

BAB II

DINAMIKA KONFLIK POLITIK MYANMAR DAN UPAYA INDONESIA DALAM KONFLIK MYANMAR

Gejolak politik Myanmar sangatlah kompleks dikarenakan Myanmar yang memiliki berbagai macam masalah dan konflik sejak sebelum kemerdekaannya dari jajahan Inggris. Mulai dari konflik dan ketegangan yang terjadi antara Myanmar dengan negara-negara tetangganya, konflik internal yang dipicu oleh Junta Militer dengan masyarakat sampai ketegangan-ketegangan antar etnis di Myanmar. Hal ini tidak terlepas dari gesekan dua kekuatan yang ada di Myanmar. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai permasalahan politik yang ada di Myanmar dan upaya Indonesia dalam membantu Myanmar untuk menyelesaikan konflik melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia dalam *case* ini.

2.1. Permasalahan politik Myanmar

Sebelum membahas kenapa terjadi kudeta di Myanmar pada tahun 2021, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu sejarah Myanmar dari mulai era penjajahan sampai kemerdekaan dan perjalanan paska kemerdekaan yang dipenuhi berbagai macam pergolakan.

Myanmar atau dulu yang dikenal dengan nama Burma merupakan negara bekas jajahan kerajaan Inggris yang memperoleh kemerdekaan pada tanggal 4 Januari 1948. Letak geografi dari Myanmar sangatlah strategis yang mana Myanmar berbatasan dengan lima negara yaitu Tiongkok di sebelah utara; Laos di bagian timur; kemudian Thailand yang berbatasan di sebelah tenggara; Bangladesh

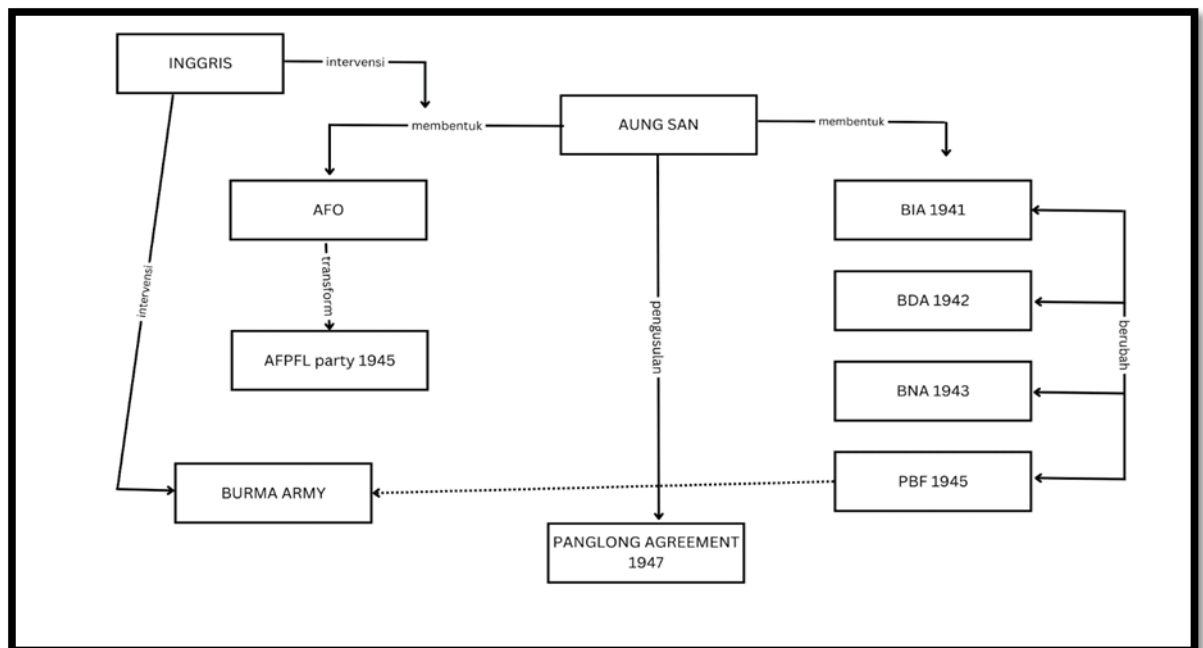
di sisi barat; serta India di sebelah barat laut. Hubungan Myanmar dengan lima negara tetangganya tidaklah begitu baik karena kondisi di dalam Myanmar yang sering terjadi konflik yang seringkali dipicu oleh pemerintah junta militer kepada kelompok etnis dan juga ketegangan antar etnis. Dari kelima negara tetangga Myanmar dapat dikatakan Tiongkok merupakan salah satu negara yang mempunyai hubungan cukup dekat dengan Myanmar karena didasarkan pada hubungan perdagangan tradisional di sektor perkebunan dan perdagangan opium yang membuat hubungan Tiongkok dan Myanmar di bidang bisnis sangat dekat sejak dahulu. Berbeda dengan hubungan Myanmar dengan empat negara lainnya yang terkesan buruk seperti hubungan Myanmar dengan Thailand yang buruk karena junta militer mengecam Thailand yang memberikan perlindungan kepada kelompok etnis Myanmar yang melarikan diri ke perbatasan dan menuduh Thailand sengaja memicu konflik di perbatasan,

kemudian Myanmar juga bersitegang dengan Bangladesh karena persoalan pengungsi dari kelompok etnis rohingya dan juga dengan India yang memiliki masalah karena Myanmar dianggap mendukung gerakan separatis India yang memiliki basis markas di daerah sangaing (BBC NEWS, 2007).

Pada masa di mana Burma masih di bawah kekuasaan Inggris, Aung San atau ayah Aung San Suu Kyi memulai perjuangan nasionalismenya dengan menciptakan partai politik yang bernama *Anti Fascist People's Burmese Forces* (AFPBF). Kemudian pada tahun 1941 Aung San membentuk *Burmese Independence Army* (BIA) sebagai bentuk perlawanannya yang lebih ekstrem lagi kepada Inggris dalam mencapai kemerdekaan yang mendapat sokongan dari militer

Jepang. Namun pada tahun 1942 Aung San merubah nama BIA menjadi *Burma Defence Army* (BDA) sebagai bentuk keberpihakannya kepada Jepang daripada Inggris. Namun pada tahun berikutnya Aung San kembali merubah namanya menjadi *Burma National Army* (BNA), dan berubah lagi pada tahun 1945 menjadi *Patriotic Burmese Forces* (PBF) sebagai perwujudan dari semangat masyarakat Burma untuk mengusir penjajah asing. Walaupun sudah berulang kali Aung San merubah nama dari kelompoknya untuk memperjuangkan kemerdekaan Burma, namun tercapainya kemerdekaan masih bertele-tele karena persatuan kelompok yang sulit diwujudkan. Maka dari itu pada Januari 1947 Aung San mengeluarkan perjanjian *Panglong Agreement*. Namun perjuangannya terhenti ketika terbunuhnya Aung San dan beberapa anggota dewan saat menghadiri pertemuan pada 19 Juli 1947 (Kurniawan & Irewati, 2006).

Gambar 2.1 Skema Perjuangan Aun San



Sumber : (Tracy & Ahmad Nuhdi, 2021)

Pada tanggal 4 Januari 1948 Burma akhirnya mendapatkan kemerdekaan penuhnya dari kerajaan Inggris dan memiliki nama resmi Union of Burma yang dipimpin oleh perdana menteri pertama U Nu selama 8 tahun. U Nu merupakan salah satu tokoh nasionalis Myanmar.

2.1.1. Kudeta Militer Myanmar Tahun 1962

Pada akhir tahun 1958, Jenderal Ne Win memimpin kudeta untuk mengambil alih pemerintahan Myanmar. Hal ini karena krisis politik dalam kepemimpinan U Nu akibat perpecahan di dalam partai Anti-Fascist People's Freedom League (AFPL). Jenderal Ne Win mengadakan pemilu pada tahun 1960 untuk mengembalikan pemerintahan ke tangan sipil dan memulihkan demokrasi. Pemilu tersebut dimenangkan oleh partai yang dipimpin oleh U Nu, yang kemudian terpilih kembali sebagai Perdana Menteri. Namun, ia digulingkan kembali pada 2 Maret 1962, menandai kudeta kedua dalam sejarah Myanmar. Peristiwa ini menunjukkan adanya gesekan kekuasaan antara militer dan pihak sipil, yang pada akhirnya menimbulkan intervensi militer pada politik dan dominasi militer dalam pemerintahan. (Trager N., 2009).

Setelah kudeta tahun 1962, Myanmar dijalankan oleh pemerintahan militer yang dikendalikan oleh junta militer dengan dukungan Dewan Revolusi. Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer terdiri dari dua kendali utama yakni: Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (SPDC) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan seorang Jenderal Besar. Pemerintahan tersebut menganut ideologi sosialis yang dikenal sebagai *The Burmese Way to Socialism*. Sejak saat itu,

hampir tidak ada aktivitas yang mencerminkan demokrasi di negara Myanmar. Dominasi militer terus menguat pada tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1963 dan 1964, Dewan Revolusi melakukan nasionalisasi terhadap semua bisnis besar, industri manufaktur besar, dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Pada tahun 1964, *National Solidarity Act* menghapus semua partai politik di Myanmar, hanya menyisakan *Burma Socialist Program Party* (BSPP) sebagai satu-satunya partai yang diizinkan merekrut anggota. Pegawai negeri juga diminta mendukung dan bergabung dengan BSPP. Pada masa itu, Myanmar dapat dianggap sebagai negara pretorianisme, di mana junta militer memiliki hubungan erat dengan pemerintahan sipil. Peran militer dalam politik terlihat melalui *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Selain menggunakan partai untuk memperkuat kekuasaan, junta militer atau *Security Development and Peace Council* (SDPC) juga menggunakan organisasi sosial politik seperti *Union Solidarity and Development Association* (USDA) untuk menarik dukungan massa sipil. Ketua USDA, Jenderal Than Shwe, juga memimpin SDPC dengan Than Aung sebagai sekretaris umum. USDA berfungsi sebagai perwakilan sipil dalam pemerintahan. SDPC berusaha membatasi ruang gerak masyarakat sipil melalui berbagai sektor seperti komunikasi, budaya, dan sosial. Contohnya, pada tahun 1989, *aktivis Democratic Party for a New Society* (DPNS) dan mahasiswa yang berkampanye untuk demokrasi ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah yang berkuasa.

2.1.2. Pemberontakan 8888 : Kemarahan Rakyat Sipil pada Militer

Pada 8 Agustus 1988, rakyat Myanmar, termasuk para biksu, bersatu untuk menuntut diakhirinya kekuasaan militer dan mendesak demokrasi. Penyebab utama dari demonstrasi besar-besaran ini adalah kondisi ekonomi yang memburuk. Rakyat Myanmar tak dapat lagi tahan dengan kesulitan finansial yang mereka alami dan mengharapkan pemerintahan baru yang dapat memperbaiki ekonomi dan kehidupan mereka serta membawa negara menuju demokrasi. Demonstrasi ini dikenal sebagai Pemberontakan 8888, yang sesuai dengan waktu peristiwa tersebut. Pemberontakan ini merupakan puncak dari ketidakpuasan, represi, kekerasan, dan kemerosotan ekonomi yang dialami rakyat Myanmar di bawah rezim militer. Pada September 1987, rezim militer menyatakan beberapa denominasi mata uang tidak berharga, yang mengakibatkan banyak tabungan rakyat Myanmar yang hilang dan memicu demonstrasi yang menunjukkan keresahan yang meluas (Danur, 2021).

Pada Maret 1988, bentrokan antara mahasiswa dan warga lokal dengan militer Myanmar memicu protes selama beberapa hari. Polisi antihuru-hara menyerang mahasiswa di dekat Jembatan Putih di tepi Danau Inya, Rangoon, menewaskan puluhan dan menangkap ratusan lainnya. Insiden ini dikenal sebagai "Jembatan Merah". Pemerintah kemudian menutup semua sekolah dan universitas. Pada Juni 1988, protes kembali terjadi setelah sekolah dan universitas dibuka kembali. Nama-nama pemimpin mahasiswa seperti Min Ko Naing dan Moethee Zun mulai dikenal. Demonstrasi semakin sering terjadi dan kekerasan terhadap demonstran meningkat. Pada 23 Juli 1988, Jenderal Ne Win, yang berkuasa sejak kudeta 1962, mengundurkan diri sebagai ketua Partai Program Sosialis Burma dan

menjanjikan demokrasi multipartai, namun juga mengancam demonstran. Sein Lwin ditunjuk sebagai penggantinya pada 29 Juli 1988, memicu kemarahan dan demonstrasi besar-besaran. Pada 6 Agustus 1988, BBC Burma menyiarkan pengumuman dari pemimpin mahasiswa Htay Kywe bahwa demonstrasi besar akan berlangsung pada 8 Agustus 1988. Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di seluruh negeri, melibatkan ratusan ribu biksu, anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, dokter, dan warga yang menentang pemerintah. (Zin, 2003).

Tentara Myanmar merespons dengan kekerasan, Seorang siswa bernama Thein Kyaw Toe ditembak mati saat membawa bendera Persatuan Pelajar Seluruh Burma. Militer dengan brutal membubarkan para pengunjuk rasa di seluruh negeri, dan demonstrasi berlangsung selama beberapa hari. Pada bulan September, pemerintahan militer dibentuk kembali sebagai junta yang dikenal sebagai Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) di bawah pimpinan Than Shwe, yang membawa Myanmar kembali ke era kerahasiaan dan teror. Perkiraan jumlah korban tewas selama demonstrasi ini berkisar antara 3.000 hingga 10.000 orang, meskipun pihak berwenang Myanmar mengklaim hanya 350 yang tewas. Demonstrasi ini juga melahirkan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang berpidato di hadapan setengah juta pengunjuk rasa di Pagoda Shwedagon pada akhir Agustus 1988, menyerukan sistem pemerintahan demokratis multipartai (Danur, 2021). Pemilu Myanmar tahun 1990 adalah pemilu multi-partai pertama sejak 1960, setelah negara tersebut diperintah oleh rezim militer. Pemilu ini diadakan pada 27 Mei 1990 untuk memilih anggota komite konstitusi yang bertugas menyusun konstitusi baru. Hasilnya adalah

kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, yang memenangkan 392 dari 492 kursi. Namun, junta militer menolak mengakui hasil pemilu tersebut dan terus memerintah negara hingga 2011.

2.1.3. Selayang Pandang Kondisi Myanmar pada Tahun 1990 – 2018

Sebelum beralih pada kudeta ketiga sebaiknya penulis sedikit memberikan beberapa peristiwa setelah pemberontakan 8888. Pada 27 Mei 1990, pemilu majelis rendah pertama di bawah pemerintahan militer baru diadakan. Meskipun NLD memenangkan pemilu ini dengan telak, hasilnya diabaikan oleh militer. Pada tahun 2007, terjadi lagi protes publik yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Puluhan aktivis ditangkap, dan para biksu Buddha mengadakan serangkaian protes antipemerintah yang dikenal sebagai Revolusi Saffron. Pada tahun 2008, pemerintah mengusulkan alokasi kursi militer dalam parlemen Myanmar. Melalui amandemen konstitusi, pemerintah ingin militer memiliki seperempat kursi di parlemen. Usulan ini juga melarang pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi untuk memegang jabatan di pemerintahan Myanmar.

Pada tahun 2010, pemilu diadakan, tetapi NLD dibatalkan sebagai peserta oleh UEC sesuai dengan UU Pemilu. Partai USDP yang didukung militer mengklaim kemenangan besar dalam pemilu pertama setelah 20 tahun, meskipun partai-partai oposisi menuduh adanya kecurangan dan menganggap pemilu itu sebagai sandiwara. Setelah pemilu, Aung San Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah. Pada Pemilu Sela 2012, lembaga pemantau Asian Network for Free Elections (ANFREL) melaporkan dinamika pemilu Myanmar. Dalam laporan

“International Election Observation Mission Republic of the Union of Myanmar By-Elections of November 3” (2018, 36-40), untuk mengisi 48 kursi parlemen yang kosong, NLD memenangkan 43 kursi dan Aung San Suu Kyi terpilih. Kemudian, pada 2015, Myanmar kembali mengadakan pemilu, di mana NLD meraih kemenangan yang diikuti dengan pengangkatan Aung San Suu Kyi sebagai Penasihat Negara Myanmar. Pada 2017 dan 2018, Myanmar juga menggelar pemilu sela untuk mengisi kursi parlemen yang kosong akibat pengunduran diri, kematian, atau pemberhentian anggota parlemen. (Catherine, 2021).

Meskipun Pemilu 2015 berhasil membentuk pemerintahan sipil di Myanmar, pengaruh militer tetap sangat dominan. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Konstitusi 2008 yang menetapkan bahwa 25% kursi di parlemen harus diisi oleh militer. Parlemen nasional Myanmar terdiri dari dua kamar: Majelis Tinggi (Amoytha Hluttaw) dan Majelis Rendah (Pyithu Hluttaw). Majelis Tinggi memiliki 224 kursi, di mana 168 kursi dipilih melalui pemilu dan 56 kursi diisi oleh militer. Sementara itu, Majelis Rendah memiliki 440 kursi, dengan 330 kursi dipilih melalui pemilu dan 110 kursi diisi oleh militer. Selain itu, di parlemen Negara Bagian dan Region, sepertiga dari total kursi juga diisi oleh militer. Tidak hanya itu, anggota militer Myanmar juga tetap memiliki hak pilih dalam pemilu. Dengan demikian, meskipun ada pemerintahan sipil, militer masih memegang kendali yang signifikan dalam struktur politik Myanmar, memastikan bahwa mereka tetap memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik dan legislasi negara.

2.1.4. Peristiwa Kudeta Militer Myanmar Kepada Pemerintahan Sipil Tahun 2021

Kudeta yang dilakukan oleh junta militer disebabkan oleh hasil pemilu Myanmar pada tanggal 8 November 2020 yang mana partai USPD hanya mendapat 6% kursi parlemen. Min Aung Hlaing menganggap pemilu yang diadakan terdapat kecurangan yang kemudian Min Aung melakukan kudeta dengan dalih menerapkan peraturan konstitusi negara pasal 417, yang mana hal ini dijadikan sebagai pembenaran kudeta yang dilakukan oleh militer untuk merebut kekuasaan dalam situasi darurat (Ivana, Dewi, & Rahmatina, 2021). Operasi militer dimulai pada tanggal 29 Januari 2021 di mana junta militer mengerahkan tank dan kendaraan kendaraan lapis baja di beberapa kota besar di Myanmar. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021 pengambilalihan kekuasaan dilakukan dengan pengumuman keadaan darurat di mana militer bergerak ke kota Naypydaw dan menahan presiden Myanmar Win Myint, Aung San Suu Kyi selaku pimpinan NLD serta beberapa politikus NLD lainnya. Penangkapan ini berlanjut pada esok hari tanggal 2 Februari yang mana junta militer Myanmar menangkap lebih dari 400 anggota parlemen dan menetakannya sebagai tahanan rumah (Sebayang, 2021).

Selain menangkap pejabat-pejabat pemerintah dan menempatkan armada di kota-kota besar, pihak militer yang mengendalikan perusahaan komunikasi *Myanmar Post and Telecommunications* (MPT) juga memutus koneksi internet serta memblokir akses ke sosial media seperti Facebook, Twitter dan Whatsapp guna menanggulangi pendemo pada tanggal 14 Februari serta dibarengi dengan pembentukan *State Administration Council* (SAC) oleh Min Aung Hlaing untuk

memperkokoh kuasa militer di Myanmar. Namun demikian, masyarakat pendemo justru membentuk *Civil Disobedience Movement* (CDM) yang dimotori oleh tenaga kesehatan dan masyarakat sipil untuk melakukan aksi demo secara massal. Selain melakukan demo gerakan ini juga diwarnai dengan aksi mogok kerja secara massal yang dilakukan oleh ratusan buruh pabrik yang bekerja di perusahaan pembuat suku cadang kendaraan militer Myanmar (Fadhlan, Annisa, & Tania, 2022). Korban jiwa pertama dilaporkan terjadi pada tanggal 9 Februari yang menewaskan seorang warga pendemo yang bernama Mya Thwe Khaing dalam demonstrasi yang dilakukan di Naypyidaw. Kemudian pada tanggal 28 Februari jumlah korban jiwa bertambah menjadi 18 orang akibat tindakan anarkis yang dilakukan oleh junta yang mengakibatkan aksi demo makin tak terkendali yang justru ditanggapi dengan makin banyaknya kendaraan lapis baja di kerahkan ke jalan (Sebayang, 2021).

2.1.5. Penyebab Konflik Politik Myanmar pada Pemilu 2021

Penulis melihat hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Myanmar yakni dari pola politik nya. Kondisi perpolitikan Myanmar dapat dikatakan masuk kedalam kategori rezim hibrida. Rezim hibrida adalah konsep yang muncul setelah berakhirnya Perang Dingin. Konsep ini menggabungkan elemen-elemen demokratis, seperti pemilu langsung dan berkala, dengan elemen-elemen otoriter, seperti represi politik, dalam satu negara. Contoh konkret dari konsep ini dapat dilihat dalam proses demokratisasi di Myanmar sejak kemerdekaannya hingga kini. Definisi lain mengacu pada negara-negara di mana pemilu rutin sering kali diwarnai oleh kecurangan, yang membatasi masyarakatnya dari menikmati demokrasi yang adil dan bebas. Negara-negara ini biasanya dihadapkan pada sejumlah tantangan,

seperti pemerintah yang menekan oposisi, sistem peradilan yang tidak independen, korupsi yang merajalela, dan pembatasan kebebasan pers dengan menekan para jurnalis. Supremasi hukum yang lemah juga menjadi ciri khas rezim tersebut. Selain itu, rezim hibrida sering kali ditandai oleh budaya politik yang terbelakang, tingkat partisipasi politik yang rendah, dan berbagai masalah dalam fungsi pemerintahan. Pemerintah dalam rezim ini cenderung menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan, termasuk manipulasi hukum dan institusi negara, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil dan politik. Hal ini menyebabkan rakyat sulit untuk mengekspresikan pendapat mereka secara bebas dan adil, serta menghambat perkembangan demokrasi yang sejati (The Economist Intelligence Unit, 2020).

2.2. Upaya Penyelesaian Konflik oleh Pihak Ketiga

Walaupun konflik ini merupakan masalah internal negara, namun hal ini juga tentunya akan berdampak besar bagi masyarakat internasional secara luas. Maka dari itu beberapa *International Organization* dan negara-negara luar menyoroti apa yang terjadi di Myanmar dan berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut untuk kepentingan bersama. Dalam sub bab ini akan membahas upaya dari PBB dan juga ASEAN sebagai organisasi transnasional di wilayah Asia Tenggara dalam menyelesaikan konflik Myanmar ini

2.2.1. Upaya PBB dalam Menyelesaikan Konflik Myanmar 2021

Berdasarkan temuan penulis, pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendorong proses demokrasi di Myanmar dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama, PBB memberikan tekanan kepada rezim junta militer

Myanmar. Dalam hal ini, PBB telah mengeluarkan berbagai pernyataan dan inisiatif, antara lain:

1. Pernyataan Pers Dewan Keamanan PBB tentang Situasi di Myanmar (SC/14430) yang dikeluarkan pada 4 Februari.
2. Pernyataan Kepresidenan Dewan Keamanan PBB (S/PRST/2021/5) yang mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menyatakan keprihatinan mendalam atas pembatasan terhadap warga sipil, tenaga medis, dan jurnalis, yang dikeluarkan pada 10 Maret 2021.
3. Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) yang mengutuk penggunaan kekuatan dan kekerasan mematikan oleh militer, serta mendukung upaya Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar dan ASEAN, yang dikeluarkan pada 18 Juni 2021 (Kapucu, 2022).

Selain itu, PBB mendesak seluruh anggota Dewan Keamanan PBB (UNSC) untuk menerapkan embargo senjata global serta sanksi ekonomi yang ditargetkan terhadap junta militer Myanmar. PBB juga mendorong agar junta militer Myanmar memberikan akses kepada Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar guna berkunjung ke negara tersebut, dengan tujuan memfasilitasi dialog dan membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, PBB juga memberikan bantuan kepada masyarakat sipil Myanmar yang terdampak oleh kekejaman rezim militer. Sebagai contoh, pada 18 Mei 2021, di bawah kepemimpinan Pemerintah Bangladesh, PBB melalui *International Organization for Migration* (IOM) dan UNHCR meluncurkan pendanaan sebesar USD 943 juta

untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi Rohingya di Bangladesh. (Fiza & Tonny, 2021).

Dan ketiga, PBB berupaya membangun kepercayaan melalui dialog, baik dengan junta militer Myanmar maupun pihak eksternal yang memiliki peran dalam memperlancar proses negosiasi. Sebagai contoh, pada 24 April 2021, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, Christine Burgener, bertemu dengan Senior Jenderal Hlaing di sela-sela Pertemuan Pemimpin ASEAN di Jakarta sebagai bagian dari upaya PBB untuk merundingkan kunjungan kemanusiaan ke Myanmar (Ratih, 2022). Selain itu, pada 14 Mei 2021, Burgener juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Prayut Chan-o-cha, yang merupakan sekutu dekat Senior Jenderal Hlaing, di Bangkok untuk membahas bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terdampak kudeta Myanmar, termasuk para pengungsi yang melarikan diri ke Thailand. Namun, hingga saat ini, junta militer Myanmar belum memberikan izin bagi Utusan Khusus PBB untuk berkunjung ke Myanmar.

2.2.2. Peran ASEAN dalam Konflik Myanmar

Dalam menanggapi konflik yang terjadi di Myanmar, ASEAN selaku organisasi domestik di Asia Tenggara telah mengambil beberapa langkah penting di bawah kepemimpinan Brunei Darussalam pada tahun 2021 dan Kamboja pada tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan di Myanmar. Langkah pertama adalah pembentukan *ASEAN 5-Point Consensus* (ASEAN 5-PC) yang dihasilkan melalui pertemuan *Special ASEAN Leaders' Meeting* (ALM) yang diadakan pada tanggal 24 April 2021 di Jakarta Sebagai salah satu inisiatif utama ASEAN dalam

mengembalikan demokrasi di Myanmar, *Chairman's Statement on ALM*, yang merupakan dokumen hasil utama dari pertemuan tersebut, juga memuat halaman terkait ASEAN 5-PC yang berbunyi sebagai berikut: "Mengenai situasi di Myanmar, para pemimpin mencapai konsensus pada hal-hal berikut: (i) harus ada penghentian kekerasan segera di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri semaksimal mungkin; (ii) dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat; (iii) seorang utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; (iv) ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center; dan (v) utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan (Catharin, 2022).

Langkah kedua adalah Penunjukan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar bertujuan sebagai "pelaksana" dari ASEAN 5-Point Consensus (5-PC). Berdasarkan mandat ALM, Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2021 menunjuk Menteri Luar Negeri Brunei, Erywan Yusof, sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar periode 2021. Inisiatif ini kemudian dilanjutkan oleh Kamboja pada tahun 2022 dengan menunjuk Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhon, sebagai Utusan Khusus untuk periode 2022. Selama dua tahun terakhir, Utusan Khusus ASEAN beberapa kali berhasil memperoleh izin dari junta militer Myanmar untuk berkunjung guna melaksanakan intervensi kemanusiaan sesuai ASEAN 5-PC. Namun, menurut pengamatan penulis, ASEAN belum berhasil mencapai kesepakatan dengan junta militer untuk bertemu langsung

dengan para tahanan politik. Langkah ketiga adalah tidak mengundang pemimpin junta militer Myanmar ke ASEAN Summit. Mendapatkan kritik dari pihak luar bahwa keberadaan ASEAN 5-PC dan Utusan Khusus tidak efektif dalam menekan rezim junta militer Myanmar, Indonesia dan Malaysia mendorong ASEAN untuk tidak mengundang para petinggi junta militer Myanmar ke perhelatan ASEAN Summit pada bulan Oktober 2021, dan mengusulkan agar Myanmar mengirim perwakilan dengan latar belakang non-politis dan tidak berafiliasi dengan militer (Heru, 2022). Usulan tersebut disambut baik oleh negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Myanmar, dan ditetapkan secara informal sebagai "pengaturan baru" untuk ASEAN Summit hingga saat ini, merujuk pada keputusan *Special Virtual ASEAN Foreign Ministers Meeting* pada bulan Oktober 2021. Akibatnya, Myanmar memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam *ASEAN Summit* hingga waktu yang belum ditentukan.

2.3.Eksistensi Budaya Jawa dalam Diri Jokowi

Dalam kerangka paradigma konstruktivis berbasis norma, kita dapat mempelajari bagaimana identitas budaya pribadi Presiden Jokowi, khususnya sebagai seorang yang memiliki latar belakang budaya Jawa, memainkan peran penting dalam membentuk pandangannya terhadap politik internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia. Konstruktivisme menekankan bahwa individu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, tetapi juga oleh identitas, nilai, dan norma yang mereka internalisasikan sepanjang hidup. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita perlu mengenal Budaya Jawa dan disini harus dipahami terkait definisi dari 'orang jawa' atau siapa itu orang jawa atau lebih tepatnya

siapaakah yang masyarakat Jawa yang dimaksud dalam konteks budaya Jawa itu. Meskipun sama-sama hidup di pulau Jawa namun kebudayaan Jawa itu sendiri bukanlah suatu yang homogen. Budaya Jawa terdiri dari beberapa Sub-Kebudayaan yang ada didalamnya. Kebudayaan Jawa terdiri dari empat subkultur yakni Jawa Banyumasan, Jawa Mataraman, Jawa Pesisir dan Jawa Timuran. Dalam penelitian ini konteks ‘orang Jawa’ adalah masyarakat yang terpengaruh budaya keratonan Yogyakarta dan Solo yang menjadikan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang biasanya masyarakatnya berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Suseno, 2003).

2.3.1. The Ways of Life Masyarakat Jawa

Jawa memiliki sejarah yang panjang dimana hal ini dapat dipelajari dari salah satu sumber yaitu babad tanah Jawa yang merupakan karya sastra termashur masyarakat Jawa yang ditulis oleh Carik Adilangu II pada masa Sultan Pakubuwono I dan selesai di era Pakubuwono II pada tahun 1722. Terdapat versi lainnya juga yang ditulis oleh Carik Tumenggung Tirtowiguno pada masa Sultan Pakubuwono III yang selesai pada tahun 1788. Karya Babad tanah Jawa berisi kisah raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Jawa yang terbagi menjadi tiga periode yakni Jawa Kuno yang terdiri dari beberapa kerajaan seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Jenggala, Kerajaan Pengging, dan Kerajaan Majapahit. Kemudian periode ke dua atau disebut juga Jawa Pertengahan berisikan tentang sejarah dari Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram. Dan pada periode ketiga yakni Jawa Baru menceritakan sejarah raja-raja di Kasusunan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegara. Dalam babad tanah Jawa, asal muasal dari suku Jawa

dimulai dari nabi adam yang beranak cucu sampai di batara guru dan keturunannya yang menjadi permulaan babad tanah jawa (Soedjipto, 2013).

Melihat karya babad tanah jawa memperlihatkan bahwa kompleksitas budaya jawa dapat dipahami karena pembentukan unsur dari budaya jawa yang begitu beragam mulai dari masuknya agama hindu, buddha dan islam, hubungan antar kerajaan, struktur sosial, contoh perilaku dari penguasa dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya pemberian pelajaran hidup yang ada dalam masyarakat jawa, tidak mengherankan jika prinsip dan norma yang dianut oleh orang Jawa sangatlah mendalam sebagai contoh prinsip hidup orang Jawa yaitu *Sejatine urip kuwi sawang sinawang* (sejatinya hidup itu hanya persoalan memandang kehidupan), filosofi tersebut jika dilihat sekilas memang terlihat sederhana namun memiliki makna yang mendalam karena memberi pengingat bahwa setiap manusia memiliki cara pandang nya masing-masing yang membuat banyak perbedaan diantara sesama, namun begitu tidak perlu untuk saling berkonflik hanya karena sudut pandang hidup tidak sama.

Terlebih dalam hidup masyarakat Jawa, diajarkan sejak kecil nilai-nilai etika Kejawaan yang biasanya disampaikan dalam *sanepo* (memberi inspirasi untuk meningkatkan kebijaksanaan dalam hidup) yang memiliki banyak bentuk seperti *tembang macapat* (lagu Jawa yang memiliki 11 jenis, contoh *Maskumambang*, *mijil*, *megatruh* dan *pocung* yang pada intinya jenis-jenis lagu tersebut menjadi pengingat kehidupan bagi orang jawa yang dimulai dari *maskumambang* atau janin, *dhandanggula* atau manisnya hidup sampai *pocung* atau kematian), *paribasan* (peribahasa dalam masyarakat Jawa seperti *becik ketitik*

olo ketoro atau perbuatan baik maupun buruk akan terlihat dan *adigang adigung* *adiguna* atau menyombongkan kekuatan kekuasaan dan kepintaran), dan *pitutur* (nasihat-nasihat yang diberikan orang tua pada anak yang biasanya dibedakan menjadi saran dan pantangan seperti *oyo lungguh duwur bantal mundhak udunen/* jangan duduk diatas bantal nanti bisulan dan *oyo keminter mundhak keblinger oyo cidro mundhak ciloko/* jangan sok pinter nanti tersesat jangan inkar janji nanti bakal celaka).

Dengan memberikan pendidikan melalui *tembang*, *paribasan* dan *pitutur*, seseorang akan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh orang Jawa terkhusus pemberian pendidikan dari orangtua pada anak yang tentu faktor keluarga menjadi salah satu hal penting dalam pembentukan kepribadian seorang pemimpin. Yang mana sejalan dengan etika Jawa yang dijelaskan oleh Franz Magnis yang menekankan pada penggambarannya dibanding penjelasan prinsip-prinsip moral (Suseno, 2003).

Jika diperhatikan lebih dalam, pitutur-pitutur Jawa ini mengandung makna yang masuk akal dan memiliki nilai etika kesopanan. Seperti *pitutur oyo mangan brutu mundhak bodho/* jangan makan bagian ekor ayam nanti jadi bodoh, yang sekilas pitutur ini tidak mengandung nilai apa-apa. Namun jika dilihat lebih dalam, anak-anak yang pada masa pertumbuhan lebih membutuhkan banyak protein yang mana di dalam ayam terletak pada dada, atau bagian daging lainnya, sementara ekor ayam mengandung lebih banyak lemak tidak terlalu diperlukan dalam masa pertumbuhan.

Masyarakat Jawa menurut Franz memiliki dua kaidah dasar didalam kehidupannya yakni pertama didalam setiap keadaan manusia hendaknya mengambil sikap sebaik mungkin supaya menghindari timbulnya konflik. Kaidah kedua berkaitan dengan sikap hormat yang harus ada dalam cara bicara dan penempatan diri sendiri untuk menunjukkan sikap hormat pada orang lain yang sesuai dengan martabat dan kedudukan orang tersebut (Suseno, 2003)

Budaya Jawa sarat sekali dengan nilai-nilai dan moral yang terkandung didalamnya. Pertama dari segi bahasa, budaya Jawa memiliki tiga lapis atau tingkatan bahasa yaitu *Kromo*, *madya* dan *ngoko* yang mana *Kromo* digunakan untuk berbicara kepada yang lebih tua, *madya* digunakan kepada orang umum atau orang asing dan *ngoko* digunakan kepada yang lebih muda atau teman sebaya. Kedua dari segi pendidikan, budaya Jawa memiliki berbagai macam cara dalam menyalurkan ajaran dan nilai moral kepada generasi selanjutnya yang biasanya ajaran tersebut akan berbentuk kiasan-kiasan dalam menjalani kehidupan yang disampaikan melalui beberapa cara seperti melalui *tembang*, *paribasan*, dan *pitutur*.

a. *Tembang*

Lagu atau dalam bahasa Jawa disebut *tembang* memiliki beberapa jenis yaitu *Tembang Dolanan*, *Tembang Klasik*, *Tembang campursari*. *Tembang Dolanan* merupakan lagu yang biasanya dinyanyikan oleh anak-anak sebagai hiburan yang bercabang menjadi *Tembang Dolanan Gagrak Anyar* dan *Tembang Dolanan Gagrak Lawas*. Kemudian *tembang campursari* merupakan tembang atau lagu dalam bahasa Jawa yang jauh lebih bebas karena tidak terikat dengan aturan-

aturan tembang atau disebut juga lagu jawa modern. *Tembang* ini begitu disukai bukan hanya oleh orang jawa namun juga non-orang jawa biasanya menyukai *tembang campursari*, contoh tembang campursari yang terkenal adalah *cidro*, *jambu alas*, *sewu kutho* dan *layang kangen* yang dipopulerkan oleh almarhum Didi Kempot. Dan terakhir, tembang Klasik yang terbagi menjadi tiga yakni *tembang Gedhe*, *tembang tengahan* dan *tembang macapat* (Lenteramata, 2020). Diantara ketiga tembang tersebut, tembang macapat sarat akan petuah akan perjalanan hidup manusia yang memiliki 11 ragam didalamnya yaitu : *maskumambang* (kehidupan manusia berupa roh dalam rahim), *mijil* (keluarnya bayi dari ibu yang melambangkan pengharapan), *kinanthi* (pembimbingan kepada anak), *sinom* (mempergunakan masa anak-anak sebaik-baiknya), *asmarandhana* (fase dimana manusia mulai mengenal cinta atau mabuk asmara), *gambuh* (pernikahan), *dhandanggula* (pengharapan akan keharmonisan pernikahan), *durma* (amarah atau ketidakharmonisan), *pangkur* (penggambaran dikala tua dan pengurangan hawa nafsu serta amarah), *megatruh* (fase akhir kehidupan yakni kematian), dan *pocung* (manusia yang wafat namun dalam tembang ini berisi hal lucu untuk menghibur hati) (Nina, 2022).

b. *Paribasan*

Masyarakat Jawa dalam menanamkan nilai moral pada generasi selanjutnya juga menggunakan *paribasan*. *Paribasan* memiliki arti perumpamaan atau ungkapan yang mempunyai ketentuan berupa satu kalimat utuh yang memiliki bentuk standar dan tidak mencerminkan arti sesungguhnya. *Paribasan*, *saloka* atau *bebasan* memiliki arti yang sama yakni perumpamaan yang masuk ke dalam

tembung entar (kiasan yang memiliki arti tidak langsung) (Prihatmi, Basuki, Yusuf, & Slamet, 2003). Masyarakat Jawa pada dasarnya mengedepankan harmonisasi dalam bersosialisasi, yang membuat *paribasan* menjadi salah satu cara untuk mengingatkan atau memberi petunjuk tanpa terang-terangan.

c. *Pitutur*

pitutur dalam bahasa Jawa memiliki arti perkataan atau secara istilah diartikan sebagai ajaran atau nasehat yang diberikan melalui lisan maupun tulisan yang juga menjadi salah satu sumber hukum adat dalam tata hidup masyarakat Jawa. *Pitutur* bukanlah perkataan belaka melainkan perkataan yang mengandung makna filosofis, etis dan bermoral yang diturunkan turun temurun dalam masyarakat Jawa, namun *pitutur* juga akan mengalami penambahan-penambahan baru sesuai masanya. Dalam *pitutur* Jawa terbagi menjadi beberapa bagian menyesuaikan konteks atau tema yang terkandung didalamnya seperti *pitutur luhur* yang bertema nasihat ketakwaan hamba kepada Tuhan. Kemudian *pitutur ageng* yang mengandung unsur hubungan antar manusia atau masyarakat dengan penguasa atau negara. Lalu ada pula *pitutur* yang bertema hubungan antar sesama manusia atau disebut *pitutur alit*. Selanjutnya ada *pitutur becik* yang mengajarkan nilai *becik* atau kebaikan serta keharmonisan. Dan terakhir ada *pitutur banyol* yang biasanya berisi candaan atau sindiran.

Salah satu metode dalam mengajarkan nilai moral di masyarakat Jawa adalah melalui *pitutur* yang berkembang secara perlahan dan menjadi norma sosial, salah satu adalah "*Siji Wadah Ojo Nganti Pecah*," yang dalam Bahasa Indonesia berarti "satu wadah jangan sampai pecah." Ungkapan ini mengandung pesan

pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, yang menunjukkan betapa masyarakat Jawa sangat mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan ini semakin dikenal luas setelah diperkenalkan oleh Habib Syech Assegaf melalui syi'ir "*zaman wes bubrah*," yang sering dinyanyikan dalam acara sholawat. Dari situ, pitutur ini menyebar luas di berbagai tempat seperti Semarang, Demak, Pekalongan, Kendal, dan sekitarnya (Nur, 2022). *Siji wadah ojo nganti pecah* disini termasuk ke dalam *pitutur becik* yang dalam *pitutur becik siji wadah ojo nganti pecah* setidaknya terdapat dua kandungan inti didalamnya yakni *memayu hayuning buwono dan urip iku urup*.

2.3.2. Pengaruh Norma Jawa pada Presiden Jokowi

Presiden Jokowi, sebagai individu dari suku Jawa, telah terpengaruh oleh norma dan nilai budaya Jawa yang kuat, seperti harmoni, kesederhanaan, dan gotong-royong (kerjasama). Nilai-nilai ini sangat penting dalam membentuk cara pandangnya terhadap diplomasi dan politik luar negeri. Sebagai contoh, prinsip harmoni dalam budaya Jawa mendorong Jokowi untuk mengutamakan hubungan yang damai dan menghindari konflik terbuka di kancah internasional. Setidaknya terdapat tiga hal yang mencerminkan norma Jawa dalam diri Jokowi yakni :

- a. Harmoni dan Diplomasi : Prinsip harmoni dalam budaya Jawa sangat tercermin dalam kebijakan luar negeri Jokowi, di mana ia lebih memilih untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain dan menghindari pertentangan terbuka. Pendekatan ini terlihat dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang seringkali moderat dan

mengedepankan negosiasi dalam menyelesaikan konflik, terutama dalam konteks diplomasi di Asia Tenggara dan di forum internasional lainnya (Wicaksono & Nugroho, 2022).

- b. Kesederhanaan dan Kebijakan : Kesederhanaan yang diajarkan dalam budaya Jawa juga tampak dalam gaya kepemimpinan Jokowi. Jokowi cenderung pragmatis dan fokus pada hasil nyata dalam kebijakan luar negerinya, seperti peningkatan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pendekatan ini menekankan bahwa kesederhanaan bukan berarti pasif, tetapi lebih kepada efektivitas dalam mencapai tujuan nasional di dunia internasional.
- c. Gotong-royong dalam Kerjasama Internasional : Prinsip gotong-royong atau kerja sama kolektif yang kuat dalam budaya Jawa juga sangat mempengaruhi pendekatan Jokowi terhadap hubungan internasional. Ia mendorong kerja sama antarnegara dalam berbagai forum, seperti ASEAN dan organisasi internasional lainnya, untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan Poros Maritim Dunia yang diprakarsainya juga merupakan cerminan dari upaya untuk memperkuat kerja sama internasional, terutama dalam bidang maritim dan ekonomi (Wicaksono & Nugroho, 2022).

Implementasi dari ketiga hal tersebut dapat dilihat dari komentar Jokowi terhadap Isu Internasional yang seringkali menggunakan bahasa yang mencerminkan nilai-nilai Jawa ketika berbicara tentang isu-isu internasional.

Misalnya, dalam pidatonya di berbagai forum internasional, ia sering menekankan pentingnya harmoni, kerja sama, dan kesetaraan antarbangsa. Kemudian Jokowi juga mendorong kebijakan luar negeri yang proaktif, terutama dalam memperkuat kerjasama regional di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan nilai gotong-royong dalam budaya Jawa yang menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama antarnegara untuk mencapai kemakmuran bersama (Rachman, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan tindakan Presiden Jokowi dalam politik internasional sangat dipengaruhi oleh identitas budaya Jawa yang telah ia internalisasikan sepanjang hidupnya. Identitas ini tidak hanya membentuk cara pandangnya terhadap hubungan internasional, tetapi juga mencerminkan bagaimana realitas politik internasional dibentuk melalui interaksi sosial, budaya, dan identitas individu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai budaya pribadi seorang pemimpin, seperti Jokowi, dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan luar negeri suatu negara dirumuskan.

